



FAKTA  
EKOLOGI

# Krisis Yang Mengalir, Dari Hulu Yang Tercemar Hingga Pesisir Yang Terancam Ekstraksi.

EDISI MARET 2026



# FAKTA EKOLOGI

*Edisi Maret 2026*

**Buletin Fakta Ekologi** merupakan publikasi yang awalnya dikembangkan dari serial 'Fakta Ekologi' yang terbit pertama kali pada bulan maret tahun 2023. Buletin ini diproduksi oleh Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulawesi Selatan. Sama halnya dengan buletin pada umumnya, Buletin Fakta Ekologi juga menyajikan rubrik yang terdiri dari empat bagian. Pertama, ada rubrik yang kami beri nama **Alarm SulSel** (berisi tentang infografis kondisi lingkungan hidup), Kedua ada **Fakta Ekologi** (laporan riset yang disajikan dalam bentuk tulisan atau Foto Esai), Ketiga ada **Cerita Kampung** (memuat cerita dan fakta dari akar rumput), dan terakhir yakni **rubrik Info WALHI SulSel** (berisi tentang informasi mengenai aktivitas WALHI Sulawesi Selatan). Selanjutnya, pada edisi Maret kali ini tim fakta ekologi memanfaatkan momentum Hari Air Sedunia dengan menerbitkan buletin berjudul **Krisis Yang Mengalir, Dari Hulu Yang Tercemar Hingga Pesisir Yang Terancam Ekstraksi**.

## **Tim Kerja Buletin Fakta Ekologi**

### **Pimpinan Redaksi**

Taufiiqurrahman Yunus

### **Tim Penulis**

Zulfaningsih, Fauziah Mardiah, Zilfa Ayu Rahman, Muh Khaeril Aqsha dan Taufiiqurrahman Yunus

### **Desain dan Tata Letak**

Fitrah Yusri

### **Editor**

Taufiiqurrahman Yunus

# TRAGEDI TUMPAHAN MINYAK PT. VALE INDONESIA

Ditulis oleh Zulfaningsih

PT Vale Indonesia adalah perusahaan pertambangan nikel yang telah beroperasi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sejak lama, tepatnya sejak didirikan pada tahun 1968 dengan nama awal PT International Nickel Indonesia (INCO). PT Vale Indonesia yang beroperasi di wilayah Sulawesi, khususnya di Kabupaten Luwu Timur. Luasan konsesi PT Vale di wilayah ini dan sekitarnya mencapai sekitar 70.566 hektar.

Kegiatan PT Vale di Luwu Timur telah memberikan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan, termasuk insiden penumpahan minyak di Desa Lioka yang mencemari lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat.



Sawah, sungai, dan saluran irigasi di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, tercemar akibat tumpahan minyak milik PT Vale Indonesia. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu (23/8) itu memicu keresahan warga karena sumber air yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat kini terkontaminasi minyak dan sulfur.



Sejak insiden tumpahan minyak PT Vale Indonesia terjadi di Luwu Timur, kami menduga PT Vale Indonesia tengah berupaya mencari "titik aman" dalam penanganan krisis lingkungan yang mereka timbulkan. Salah satu indikasi kuat dari dugaan ini terlihat dari pola keterlibatan pemerintah daerah dalam seluruh proses penanganan dampak, mulai dari pendataan pemilik lahan hingga pemetaan wilayah terdampak.



**1**  
**18,777 Km**  
 Alur Sungai  
 Terdampak.

**2**  
 Merusak Zona Sawah,  
 Irigasi Persawahan,  
 dan Kebun Warga.



Peta tumpahan minyak PT. Vale Indonesia



Dokumentasi Tim Investigasi WALHI Sulsel

## HASIL INVESTIGASI LAPANGAN

Desa Lioka	Desa Timampu
<b>Geografi &amp; Demografi</b>	
Pusat pemerintahan dusun, mayoritas masyarakat masyarakat adat Padoe. Berada di wilayah hulu.	Wilayah pesisir Danau Towuti (25.340 Ha), pusat sumber ekonomi hilir.
<b>Respons Warga</b>	
Cenderung menerima kompensasi dan mengikuti arahan Pemda serta Perusahaan.	Gelombang protes keras. Melakukan demonstrasi pada 17 Oktober 2025 menuntut hak ganti rugi.
<b>Status Kompensasi (Realitas 2026)</b>	
100% sawah aktif selesai dibayar (Rp98 Juta/Ha + Rp10 Juta pengelola). Namun, empang & hortikultura tertahan.	20-30 warga belum dibayar. Pembayaran kebun/empang macet akibat alasan hambatan administrasi dan lambatnya pemetaan theodolite PT Vale.

# TUNTUTAN

1

PT VALE HARUS MELAKUKAN GANTI RUGI  
SECARA MENYELURUH KEPADA SETIAP WARGA  
YANG TERDAMPAK

2

PT VALE HARUS MELAKUKAN PEMULIHAN  
LINGKUNGAN SECARA MENYELURUH  
TERHADAP WILAYAH YANG TERDAMPAK  
PENCEMARAN

3

KEMENTERIAN ESDM DAN LH HARUS  
MELAKUKAN AUDIT MENYELURUH ATAS  
PERISTIWA PENCEMARAN TUMPAHAN MINYAK  
PT VALE

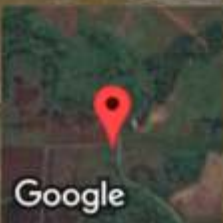
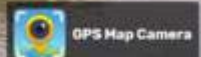
4

KEMENTERIAN ESDM DAN LH MEMBERIKAN  
SAKSI KEPADA PT VALE ATAS TERJADI  
PENCEMARAN LINGKUNGAN

**“PT.VI Tolong Komitmen!  
Uang Kami Sudah Habis,  
Janji Tak Ada Habisnya”**



**KOMITMENKI?  
UANG HABIS, CERITATA  
TAK ADA HABISNYA**



**Kecamatan Towuti, Sulawesi Selatan, Indonesia**

Jalan Tanpa Nama, Langkae Araya, Kec. Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92982, Indonesia, Kecamatan Towuti, Sulawesi Selatan 92982, Indonesia  
Lat -2.659918° Long 121.392552°

16/10/2025 04:10 PM GMT +08:00

# Racun dari Hulu: Tumpahan Minyak Pt Vale Dan Luka Yang Belum Sembuh Di Luwu Timur

*Ditulis oleh Zulfaningsih HS*

Sungai Koromusilu yang membelah Desa Lioka di Kabupaten Luwu Timur pernah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat adat Padoe. Airnya mengairi sawah, mengalir kolam ikan, dan menjadi sumber air minum bagi ribuan warga di hilirnya. Kini, sejak tumpahan minyak jenis Marine Fuel Oil (MFO) milik PT Vale Indonesia mencemari alirannya pada Oktober 2025, sungai itu berubah wajah: keruh, berbau, dan membawa ancaman yang belum sepenuhnya dipahami dampaknya.

Diperkirakan lebih dari 90.000 liter minyak bocor dari pipa PT Vale Indonesia, mengalir sepanjang 18,77 kilometer dari hulu Sungai Koro Musilu hingga bermuara ke Danau Towuti—salah satu danau air tawar purba terbesar di Asia Tenggara yang menjadi kawasan Ramsar dan habitat endemik yang tak ternilai. Bukan hanya sungai, irigasi persawahan, kolam ikan, dan lahan kebun di enam desa terdampak; Lioka, Langkea Raya, Baruga, Wawondula, Matompi, dan Timampu; turut tercemar.

“Ini bukan kali pertama. Ini sudah berulang sejak 2009. Setiap kali tumpah, masyarakat yang menanggung.”

Lebih menyedihkan lagi, ini bukan musibah pertama. Catatan WALHI Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa insiden tumpahan minyak PT Vale telah terjadi setidaknya lima kali sejak tahun 2009: di Laut Lampia pada 2009, 2012, dan 2014; di Desa Lioka pada 2010; dan kini terjadi lagi pada tahun 2025. Pola kelalaian sistemik ini menjadi bukti bahwa klaim keberlanjutan yang selama ini digembar-gemborkan perusahaan tidak lebih dari kosmetik semata.

## Bencana yang Bisa Dicegah

Tim investigasi WALHI Sulawesi Selatan berangkat ke lokasi pada 13 Oktober 2025 dan melakukan penelusuran lapangan selama empat hari di Desa Lioka dan Desa Timampu. Apa yang ditemukan jauh melampaui apa yang dilaporkan perusahaan.

Di Desa Lioka, pusat semburan minyak, kondisi sungai masih keruh saat dikunjungi. Air yang sebelumnya jernih kini mengandung sedimen yang bukan berasal dari proses alami, melainkan dari aktivitas pembersihan PT Vale Indonesia yang justru mengaduk lumpur dan material pencemar ke seluruh badan air. Sekitar 700 warga dipekerjakan perusahaan untuk membersihkan sungai, tanpa perlengkapan keselamatan memadai, tanpa informasi bahaya limbah B3 yang mereka sentuh setiap harinya.

Di Desa Timampu yang berada di hilir, kondisi tak kalah memprihatinkan. Masyarakat melaporkan ikan mati massal, burung bangau dan belibis yang biasa singgah di tepian Danau Towuti ditemukan mati. Salah seorang warga mengalami gangguan tenggorokan setelah mengkonsumsi ikan dari sungai yang tercemar, namun tidak ada pemeriksaan kesehatan berkala yang diberikan perusahaan kepada warga terdampak. Warga juga berhenti mengolah sawah, mengambil hasil kebun, dan memanen ikan dari kolam mereka sendiri.

**Bencana yang Bisa Dicegah**  
**Tabel 1. Data Dampak Tumpahan Minyak PT Vale Indonesia 2025 Dicegah**

Indikator	Fakta Lapangan
<b>Volume tumpahan</b>	Lebih dari 90.000 liter Minyak Bakar (MFO)
<b>Panjang pencemaran</b>	18,77 km; dari hulu Sungai Koromusilu hingga Danau Towuti
<b>Lahan terdampak</b>	82 hektare sawah rusak total; kebun dan kolam ikan ikut tercemar
<b>Desa terdampak</b>	6 desa: Lioka, Langkea Raya, Baruga, Wawondula, Matompi, Timampu
<b>Dampak kesehatan</b>	1 warga keracunan ikan; ratusan warga terpapar MFO tanpa APD
<b>Insiden sebelumnya</b>	2009, 2010, 2012, 2014; pola kelalaian berulang selama 16 tahun

*Sumber: Investigasi Lapangan WALHI Sulawesi Selatan, Oktober 2025*

Seluas 82 hektare sawah masyarakat rusak total. Menurut perhitungan WALHI, setiap petani yang tidak dapat mengolah lahan seluas satu hektar kehilangan potensi penghasilan Rp 42.000.000 per musim tanam—atau Rp 84.000.000 per tahun. Jika dikalikan ratusan petani yang terdampak, angka kerugian ekonomi yang ditanggung masyarakat sangat jauh melampaui kompensasi yang dijanjikan perusahaan.

## Janji Kompensasi yang Tersedat

Setahun setelah bencana, janji pemulihan belum sepenuhnya terealisasi. Berdasarkan monitoring lapangan WALHI Sulawesi Selatan pada awal 2026, situasi di dua titik utama terdampak masih jauh dari kata tuntas.

### a. Dusun Molindoe, Desa Lioka

Kompensasi untuk sawah aktif disebut telah selesai dibayarkan. Namun sekitar 30 persen kompensasi untuk item lain—termasuk empang, sumur, dan tanaman hortikultura—masih dalam proses. Bantuan sosial berupa beras, minyak, dan telur yang diberikan setiap tiga hari sekali telah dihentikan sejak Desember 2025 karena dianggap proses kompensasi sudah berjalan. Warga berkomitmen menunggu selama lima musim tanam sebelum memverifikasi kembali kelayakan lahan mereka.

### b. Desa Timampu

Situasi di Timampu lebih mengkhawatirkan. Lebih dari 20 hingga 30 warga dilaporkan belum menerima haknya. Peta polygon dan pengambilan titik koordinat menggunakan theodolite belum tuntas dilakukan perusahaan, sehingga proses pembayaran mandek. Aktivitas kelompok tani menggunakan traktor sempat dibatalkan karena menunggu proses kompensasi yang tidak kunjung selesai. Kompensasi untuk empang dan kebun dilaporkan masih banyak yang belum terselesaikan.

**Tabel 2. Status Kompensasi dan Pemulihan Per Awal 2026**

Aspek	Dusun Molindoe (Desa Lioka)	Desa Timampu
<b>Sawah Aktif</b>	100% selesai dibayarkan	Sebagian besar selesai; sebagian warga masih terkendala administrasi
<b>Warga Belum Terbayar</b>	Sekitar 30% item non-sawah belum terbayar	.....
<b>Empang &amp; Kebun</b>	Masih proses administrasi	Banyak yang belum terselesaikan
<b>Kendala Utama</b>	Penambahan luasan kecil dan area di bawah tower masih diproses	Peta polygon dan titik koordinat theodolite belum selesai
<b>Bantuan Sosial</b>	Dihentikan Desember 2025	-

*Sumber: Monitoring Lapangan WALHI Sulawesi Selatan, 2026*

Nilai ganti rugi yang ditetapkan adalah Rp 98 juta per hektar untuk dua musim tanam, ditambah uang pengelola Rp 10 juta per hektar. Namun warga menolak kategorisasi “sawah tidak produktif” yang digunakan perusahaan, karena pada dasarnya seluruh lahan masih bisa dikelola dan justru tengah dalam masa produktif saat bencana terjadi.

## Negara di Bawah Bayang-bayang Perusahaan

Salah satu temuan paling mengkhawatirkan dari investigasi WALHI Sulawesi Selatan adalah pola keterlibatan pemerintah daerah yang justru memperlemah posisi warga dalam proses penanganan bencana.

Sejak awal, pendataan pemilik lahan terdampak dilakukan melalui koordinasi antara tim perusahaan dan aparatur desa/pemda—bukan oleh lembaga independen. Pemetaan kerusakan menggunakan kategori “rendah”, “sedang”, dan “tinggi” tanpa dasar kajian lingkungan yang transparan. Warga sebagai korban sering tidak diundang dalam diskusi teknis, dan hanya menerima hasil akhir dari laporan yang disusun oleh perusahaan dan pemerintah.

“Pemerintah desa sangat sepeham dengan perusahaan, jadi masyarakat hanya mengikuti pemerintah desa. — Warga Desa Lioka”

Dalam kontestasi antara warga terdampak dan korporasi besar, negara semestinya hadir sebagai pelindung. Namun yang terjadi sebaliknya—pemerintah daerah berfungsi sebagai legitimator proses yang menguntungkan perusahaan, bukan sebagai penjamin hak masyarakat.

Akibatnya, publik dan organisasi masyarakat sipil tidak mendapat akses penuh terhadap data kerusakan, mekanisme kompensasi, dan audit dampak lingkungan yang independen. Bahkan demonstrasi warga Timampu pada 17 Oktober 2025 yang menuntut kejelasan kompensasi—karena nilai yang ditawarkan PT Vale (Rp 7.000/kg) dianggap jauh lebih rendah dari harga pasar (Rp 14.000–15.000/kg beras)—tidak mendapatkan respons yang memadai dari otoritas setempat.

## Danau Towuti Tidak Bisa Menunggu

Danau Towuti bukan sekadar danau. Ia adalah warisan alam yang terdaftar sebagai lahan basah Ramsar—kawasan yang secara internasional diakui sebagai ekosistem penting untuk dijaga. Di dalamnya hidup spesies-spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di muka bumi. Ketika minyak mengalir ke sana, bukan hanya warga Timampu yang kehilangan sumber air minum tapi seluruh ekosistem purba itu terancam oleh polutan kimia yang tidak mudah terurai.

Tim WALHI Sulawesi Selatan pada Oktober 2025 mencatat bahwa meskipun PT Vale Indonesia melalui pemberitaan Antara News Makassar pada 25 Oktober 2025<sup>1</sup> mengklaim seluruh sebelas titik penanganan telah dituntaskan dan air kembali jernih, temuan lapangan menunjukkan kenyataan yang berbeda: di pos 7, 8, 9, dan 11, bekas-bekas minyak masih tampak di badan sungai, lahan sawah, dan jaringan irigasi.

Klaim serupa kembali diulang pada 19 Januari 2026, ketika Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk., Bernardus Irmanto, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta menegaskan bahwa seluruh proses pemulihan telah selesai.<sup>2</sup> Namun monitoring lapangan WALHI Sulawesi Selatan pada awal 2026 kembali membantah klaim tersebut: di tempat pertama tumpahan minyak, sisa-sisa minyak masih ditemukan mengendap, bau menyengat masih tercium, dan sepanjang 18,777 kilometer alur tumpahan yang ditelusuri tim, karung-karung berisi material tercemar masih tergeletak di sejumlah titik. Klaim sepihak perusahaan tanpa verifikasi independen hanya menambah daftar panjang ketidakpercayaan masyarakat terhadap PT Vale Indonesia.

Pemulihan ekosistem sungai dan danau tidak bisa diserahkan begitu saja kepada perusahaan yang berkepentingan. Dibutuhkan tim ilmuwan independen, pemantauan berkala, dan komitmen pemerintah pusat untuk menegakkan hukum—bukan sekadar administrasi yang menutup masalah tanpa menyelesaikan akarnya.

<sup>1</sup><https://makassar.antaranews.com/berita/610933/pasakebocoran-pipa-minyak-pt-vale-berfokus-kualitas-air-di-towuti>

<sup>2</sup><https://nikel.co.id/2026/01/20/pt-vale-klaim-pemulihan-kebocoran-pipa-minyak-di-towuti-sudah-selesai/>

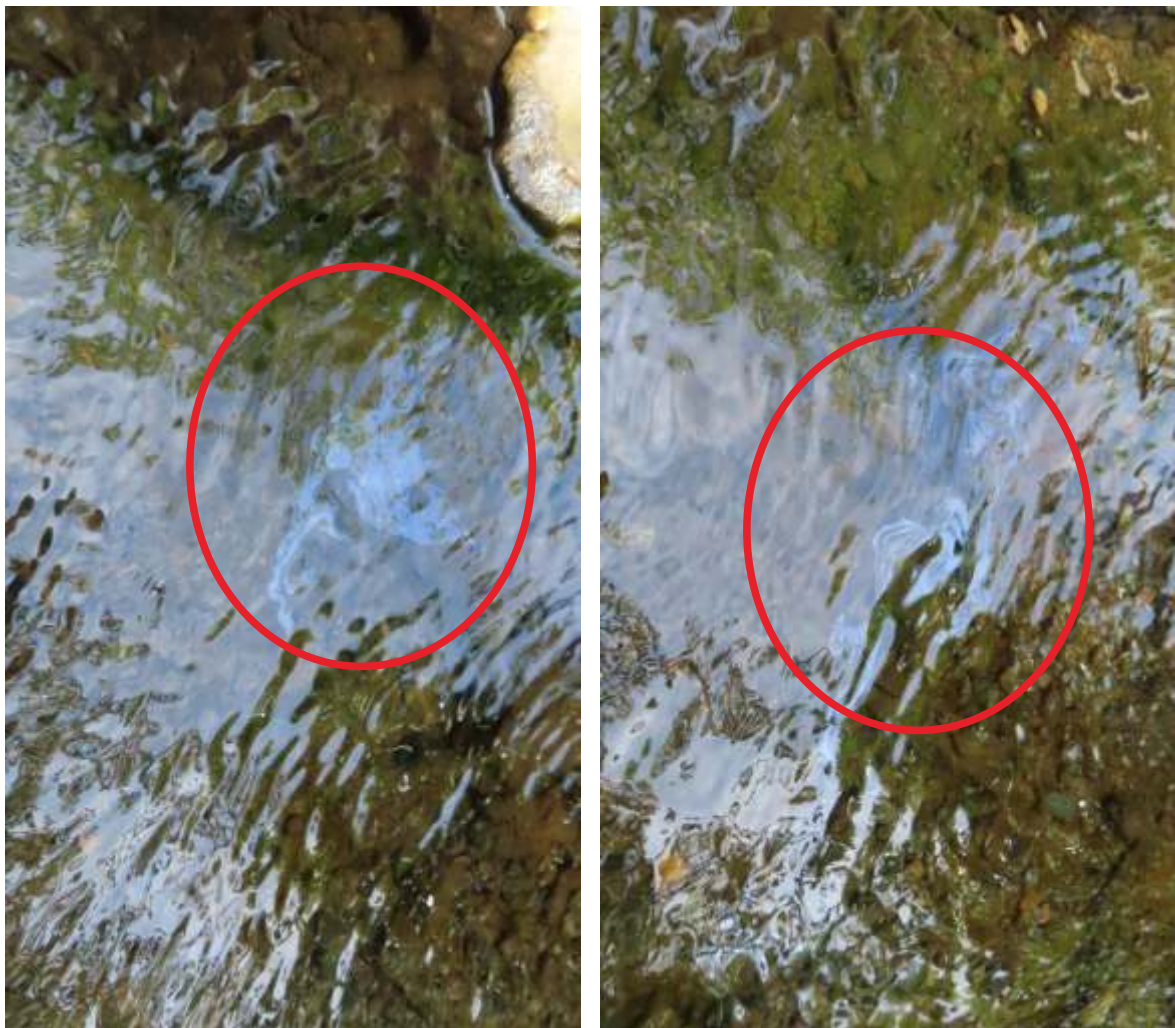
## Catatan Penutup

Setahun lebih berlalu. Sungai yang dijanjikan bersih masih keruh. Kompensasi yang dijanjikan adil masih tersendat. Danau yang dijanjikan pulih masih menanti. Di balik angka-angka kompensasi yang diperdebatkan, ada kehidupan yang terganggu, ada hak yang belum dipenuhi, ada ekosistem yang menanggung beban yang bukan kesalahannya.

Bagi masyarakat adat Padoe di Desa Lioka, bagi nelayan dan petani di Timampu, dan bagi seluruh warga enam desa yang tercemar, ini bukan sekadar bencana lingkungan. Ini adalah ujian apakah hukum berlaku sama bagi semua—termasuk bagi perusahaan nikel raksasa yang selama puluhan tahun mengambil kekayaan bumi Sulawesi Selatan.

WALHI Sulawesi Selatan akan terus memantau, mendampingi, dan bersuara. Selama keadilan belum ditegakkan, alarm ini tidak akan berhenti berbunyi.

\*\*\*







# Cerita KAMPUNG

## Suara Rakyat menang di Bonto Bahari, Peran Solidaritas Ekologis”

*Ditulis Oleh : Fauziah Mardiah*

Rencana pembangunan proyek Industri Petrokimia, PT Sulsei Citra Indonesia (Perseroda Sulsei) di Desa Lemo-lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, telah berhasil ditanggguhkan untuk sementara ini karena mendapat penolakan keras dari masyarakat. Proyek yang awalnya direncanakan di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) seluas 3.475 hektar ini, dikecam masyarakat karena mengancam lingkungan, ekosistem pesisir, serta sektor pariwisata. Bersatunya suara masyarakat dalam upaya memperjuangkan pembatalan proyek ini menggambarkan pentingnya peran setiap individu dalam mendukung kelestarian lingkungan demi tujuan bersama.

Edukasi mengenai kesadaran

lingkungan termasuk pencegahan kerusakan, serta pencegahan pencemaran lingkungan amat penting bagi masyarakat, namun yang tak kalah penting adalah menjaga konsolidasi bersama untuk tetap meneruskan kesadaran dan berani mengemukakan aspirasi antar individu agar terbentuk musyawarah melalui kedekatan interpersonal yang kuat, hal inilah yang disebut solidaritas ekologis.

Investasi pabrik petrokimia di Bulukumba dimulai pembahasannya sejak Maret 2024. Saat itu, PT Sulsei Citra Indonesia (Perseroda Sulawesi Selatan) menandatangani MoU dengan Pemkab Bulukumba untuk pengadaan lahan di Desa Lemo-lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, guna membangun pabrik urea, ammonia, refinery oil, dan

fasilitas terkait. Rencana ini mencakup investasi hingga USD 2,8 miliar. Sejak awal pembahasan proyek ini sudah menuai penolakan warga akibat kekhawatiran utama mengenai dampak lingkungan dan dampak sosial, terlebih sejak ditandatanganinya MoU pada tahun 2024 yang berisi kesepakatan antara Pemkab Bulukumba dan PT Sulsei Citra Indonesia.

Mayoritas masyarakat menolak adanya industri petrokimia tersebut karena lokasi berada di kawasan konservasi Tahura Trombukara dan terumbu karang. Kehadiran industri ini sangat dikhawatirkan dapat mencemari lingkungan melalui udara dan air, tak terkecuali beberapa ekosistem di laut seperti terumbu karang, selain mencemari air yang diakses atau dimanfaatkan warga

untuk hidup sehari-hari, pencemaran air laut ini juga sangat berpotensi mengganggu mata pencaharian para nelayan sekitar.

Secara hukum, Kawasan Tahura merupakan kawasan konservasi yang kewenangan dan peruntukannya berada di bawah pemerintah pusat dan tidak dapat diganggu gugat, oleh karena itu, rencana tersebut pada dasarnya tidak dapat ditindaklanjuti. Namun pembahasan proyek tersebut masih dilanjutkan hingga Februari tahun 2026, maka wajar jika banyak masyarakat yang tetap protes dan menegaskan keberpihakannya. Warga Bonto Bahari bersama para aktivis lingkungan menyoroti sikap pemerintah daerah yang disebut sempat meminta masyarakat mengosongkan wilayah tersebut. Permintaan itu dinilai warga menjadi problematik karena menyangkut ruang hidup yang telah ditempati oleh lintas generasi, sehingga validitas hak hidup dan keadilan lingkungan yang dirasakan

masyarakat menjadi terancam.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang didapatkan dari warga setempat bersama para aktivis turut menegaskan bahwa industri yang akan mengelola zat amonia dan beberapa emisi lainnya ini memiliki potensi risiko yang besar, bahkan meskipun diklaim menggunakan teknologi modern. Namun, perubahan metode pengelolaan tidak serta merta menghilangkan daya rusak terhadap lingkungan, terlebih pencemaran melalui air yang berasal dari limbah industri.

Puncak polemik dari kontroversi pembukaan lahan pabrik petrokimia ini terjadi pada saat perwakilan dari masyarakat melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 4 februari 2026, beberapa masyarakat memutuskan menerobos pintu saat rapat berlangsung demi menyampaikan aspirasi mereka, karena bagaimanapun setiap aspirasi dari warga dan individu adalah valid, dan pembungkaman terhadapnya

adalah sebuah sikap tidak adil dan anti-demokrasi. Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Bulukumba dalam menyikapi kejadian tersebut, menyatakan telah menolak kawasan industri Petrokimia jauh sebelum aksi unjuk rasa pada 4 Februari 2026. Mereka menghapus Pasal 51 Ayat 1 Ranperda RTRW 2026 yang memasukkan Kecamatan Bonto Bahari sebagai kawasan industri, hal tersebut didukung pula oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.

Kendati demikian, keputusan pemerintah Bulukumba beserta kontrak kerjasama dengan industri petrokimia dikabarkan belum memberikan ketegasan ataupun informasi aktual dan jelas secara hukum hingga saat ini, oleh karena itu, solidaritas ekologis sesama rakyat masih perlu terus dilanggengkan dan masih akan sangat dibutuhkan dalam mengedukasi semakin banyak masyarakat agar memiliki kesadaran keadilan ekologi yang penting untuk manfaat jangka panjang termasuk untuk generasi di masa mendatang.

# Dari Pendaki Gunung ke Gerakan Penyelamatan Waduk Bili-Bili

Oleh : Zilfa Ayu Rahman

Krisis lingkungan tidak selalu lahir dari ketidaktahuan, tetapi seringkali muncul dari pembangunan yang tidak memberi ruang bagi masyarakat untuk bersuara. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah

dinamika sosial dan ekologis di sekitar Waduk Bili-bili, Sulawesi Selatan. Pembangunan bendungan yang dimulai pada masa Orde Baru tidak hanya membawa perubahan fisik wilayah, tetapi juga

memunculkan persoalan hak hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Perjalanan advokasi lingkungan di kawasan ini tidak terlepas dari pengalaman personal

seseorang yang berangkat dari kecintaannya terhadap alam.

“Saya pertama kali mendaki Gunung Bawakaraeng tahun 1988, dan sejak itu kegiatan mendaki hanya sekadar hobi.” Pak Rais

Seperti itulah penjelasan dari Pak Rais, begitulah sapaan akrabnya, dari aktivitas tersebut, kemudian lahir sebuah organisasi pecinta alam pada tahun 1992, yaitu PA ARTS PALA GOWA (Artspala), sebagai wadah bagi generasi muda untuk berinteraksi dengan alam. Namun, perubahan mulai terasa ketika pembangunan Bendungan Bili-bili berlangsung di tengah keterbatasan ruang demokrasi pada masa itu.

“Saat itu ruang aspirasi masyarakat sangat dipersempit, sehingga banyak suara warga tidak tersampaikan.” Pak Rais

Kondisi tersebut mendorong lahirnya gerakan advokasi yang lebih terstruktur. Pada tahun 1994, dibentuk Lembaga Tunas Rakyat Indonesia (LTRI) Sulawesi Selatan sebagai ruang kolektif untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat terdampak pembangunan.

“LTRI kami jadikan sebagai rumah gerakan untuk melakukan advokasi kebijakan dan memperjuangkan hak-hak warga.” Pak Rais

Selama kurang lebih satu dekade, LTRI hadir dan aktif dalam membangun jaringan advokasi bersama berbagai organisasi, melakukan advokasi,

dan memperjuangkan hal-hak warga baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Jaringan yang dimiliki LTRI juga cukup luas, darai penjelasan Pak Rais, LTRI berjejaring dengan JARI Celebes, WALHI SULSEL, Infid Jakarta, hingga jaringan di Jepang.

Upaya dalam memperluas jejaring untuk kegiatan advokasi dan perjuangan hak-hak masyarakat tersebut bahkan berhasil membawa isu lokal ke ruang global melalui forum internasional.

“Saya pernah menjadi pembicara di parlemen Jepang dan Singapura untuk menyampaikan hak-hak warga yang diabaikan dalam pembangunan Bendungan Bili-bili.” Pak Rais

Namun, dinamika internal organisasi menjadi tantangan tersendiri dalam keberlanjutan gerakan. Oleh karena itu, pada tahun 2006 didirikan Yayasan Pendidikan Lingkungan (YPL) sebagai transformasi gerakan yang lebih berfokus pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat. YPL kemudian mengambil peran penting dalam upaya penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang serta pendampingan masyarakat di kawasan greenbelt Waduk Bili-bili, khususnya kelompok usaha kuliner Lesehan Beroanging.

Bagi Pak Rais, YPL dirikan untuk fokus pada penyelamatan DAS Jeneberang dan pendampingan masyarakat di kawasan waduk. Kemudian, memasuki tahun 2021, kebijakan baru kembali

mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Kerja sama antara BBWS Pompengan Jeneberang dan Kodam XIV Hasanuddin berdampak pada relokasi para pengelola usaha di kawasan waduk. Kerja sama yang dilakukan itu kemudian berdampak pada relokasi seluruh pengelola lesehan di kawasan waduk.”

Situasi yang terjadi kemudian mendorong YPL untuk mengembangkan arah gerakan menjadi lebih komprehensif, tidak hanya advokasi, tetapi juga aksi nyata berbasis masyarakat. YPL kemudian mengembangkan gerakan menjadi penyelamatan waduk dengan fokus pada edukasi, inovasi, dan konservasi.

Dalam aksi dan kampanye yang dilakukan, berbagai program berbasis partisipasi masyarakat kemudian dijalankan, mulai dari pemanfaatan lahan konservasi hingga pengelolaan sampah dan ekonomi alternatif. Aksi ini memanfaatkan lahan 6 hektar untuk area konservasi dan mendorong warga terlibat dalam gotong royong membersihkan waduk.”

Selain itu, inovasi berbasis swadaya juga terus dikembangkan, seperti pembuatan pupuk organik, eco enzyme, ecobrick, serta pengadaan rumah sampah dengan dukungan berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat. Upaya kolektif tersebut

akhirnya mendapatkan pengakuan.

“Alhamdulillah, pada tahun 2023 YPL meraih juara satu tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan juara tiga tingkat nasional dalam kategori pengelola lingkungan hidup.”

Upaya yang dilakukan selama ini dalam memperjuangkan hak-hak hidup masyarakat yang kemudian juga relevan dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup

menghadirkan harapan baru atas keberlanjutan lingkungan di masa yang akan datang. Ke depan, YPL terus berkomitmen mengembangkan inovasi lingkungan yang berkelanjutan.

“Tahun 2026 kami akan memanfaatkan plastik sebagai bahan paving block dan membangun tiga unit Teba Modern sebagai pusat pembelajaran kompos.”

Inovasi dalam bentuk aksi penyelamatan lingkungan akan

terus dilakukan, pada akhirnya, gerakan lingkungan di Waduk Bili-bili menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari langkah kecil, dari hobi menjadi advokasi, dari advokasi menjadi gerakan kolektif yang berdampak luas. Kolaborasi antara masyarakat, organisasi, dan berbagai pihak menjadi kunci utama dalam mewujudkan keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan di masa depan.

## Tetes Air Reklamasi Untia

*Oleh Muh. Khaeril Aqsha*

Untia adalah daerah pesisir yang ada di Sulawesi Selatan, dan juga merupakan sebuah kampung nelayan yang dimana para warga hidup dengan damai dan harmonis. Namun dibalik keharmonisan itu, ada permasalahan yang mereka hadapi. Permasalahan yang dihadapi tidak lain adalah terkait dengan krisis air bersih. Air bersih menjadi masalah utama di Untia, sampai detik ini para warga di sana harus membeli air bersih dari luar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikarenakan tidak adanya akses air bersih di daerah tersebut, menurut salah satu warga, dulu sempat ada akses air bersih dari pemerintah berupa PDAM, akan tetapi selama beberapa bulan kemudian tidak ada air yang mengalir.

“Di sini yang menjadi masalah utama yaitu kurang mendapatkan akses air bersih,

dulu ada, cuma beberapa bulan itu tidak ada air yang mengalir sehingga warga di sini memilih untuk memutus PDAM karena dibayar setiap bulan tapi tidak ada air yang mengalir”

Krisis yang terjadi menyebabkan warga yang tinggal di wilayah Untia memilih untuk mencabut akses dari PDAM tersebut. Hal ini dikarenakan mereka yang resah karena setiap bulan membayar harus membayar ke PDAM namun mereka tidak mendapatkan akses atas air. Pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih, mereka membeli air bersih dari luar dengan harga 500 RB / tandon yang hanya bertahan selama 3-7 hari. Walau harus membayar mahal dengan keterbatasan, ini menjadi satu-satunya jalan dibandingkan mengharapkan akses air dari PDAM yang bisa dibilang tidak berjalan. Setiap tahun warga di berikan janji

bahwa mereka akan mendapatkan akses air bersih, yang akan diwadahi oleh pemerintah tapi sampai saat ini belum terealisasi.

“Biasanya warga di sini beli air bersih dari luar untuk keperluan sehari-hari dan harganya itu 500 RB / tandon dan cuma bertahan beberapa hari” Warga Untia

Warga di Untia memiliki banyak harapan tentang air bersih, mereka berharap pemerintah lebih melihat atau peka terhadap permasalahan krisis air bersih yang ada di sana. Karena mereka sudah lelah, setiap tahun mereka diberikan janji pemecahan masalah terkait krisis air bersih ini, namun sampai sekarang krisis yang dihadapi masyarakat Untia tidak kunjung selesai. Bahkan warga juga sering melaporkan kepada Dinas Sosial tentang permasalahan air bersih ini tapi

juga tidak ada solusi yang dihadirkan.

“Solusinya Belum ada, karena setiap kita melaporkan kita hanya diberikan janji bahwa mereka segera melakukan tindak lanjut untuk permasalahan air bersih tapi sampai sekarang belum ada” Warga Untia

Masalah krisis air menjadi permasalahan yang selama ini dialami oleh masyarakat Untia, keterangan warga kemudian menghadirkan sebuah harapan, bahwa kedepannya krisis air bersih ini bisa diatasi dan pemerintah lebih jeli dan peka terhadap permasalahan air bersih karena sudah puluhan tahun krisis air ini terjadi karena sudah beberapa kali warga melakukan pengajuan dan sampai saat ini belum ada solusi yang hadir.

Namun sayangnya belum selesai dengan krisis air, di tengah harapan yang masih menjadi

khayalan, masalah lain justru hadir di Wilayah Untia terkait dengan adanya proyek reklamasi. Saat ini, kampanye terkait dengan Tolak Reklamasi Untia menjadi pembicaraan hangat di Kota Makassar, namun tanggapan dari warga bahwa proyek reklamasi ini masih simpang-siur, tapi warga memilih untuk menolak adanya proyek reklamasi tersebut, dikarenakan bakal berdampak kepada kehidupan para nelayan dan warga di sana.

“terkait dengan reklamasi sebenarnya masih simpang-siur tapi banyak yang bilang bahwa bakal ada proyek reklamasi dan Untia menjadi salah satu tempat yang akan terdampak, tapi warga di sini menolak adanya proyek reklamasi, karena tentu bakal berdampak pada sumber kehidupan masyarakat di sini apalagi mayoritas penduduk di sini adalah nelayan otomatis ketika reklamasi itu berjalan penduduk di sini bakal kehilangan mata pencaharian,

dan krisis air bersih yang di sini tak kunjung usai. Terutama tanaman mangrove bakal hilang karena di sini juga banyak yang membudidayakan tanaman mangrove.” Warga Untia

Ketika reklamasi berjalan, para nelayan akan kehilangan sumber penghidupan mereka, bukan hanya krisis air, krisis lingkungan, hingga krisis pangan akan terjadi di wilayah Untia dan dibalik permasalahan krisis air bersih di Untia tak akan pernah usai, bayangan kehancuran dari aktivitas reklamasi akan menjadi tantangan tersendiri di masa yang akan datang. Maka dari itu penolakan reklamasi di wilayah Untia harus terus disuarakan, karena lebih dari menghancurkan kehidupan nelayan, kehadiran proyek reklamasi akan mengancam eksistensi sumber daya laut dan juga ketahanan pangan masyarakat Untia.

# Krisis Air dan Kekeringan, Bukan Lagi Fenomena Musiman, Melainkan Krisis Yang Diciptakan.

Oleh: Taufiqurrahman Yunus

Senin, 23 Oktober 2023 saya berangkat menuju kampus, sebagai mahasiswa semester 11 yang baru saja proposal bulan Agustus, kampus masih menjadi kunjungan sehari-hari saya. Namun bedanya, sebulan terakhir kampus bukan hanya

sebagai tempat belajar ataupun sebagai tempat berperang menuju kelulusan. Sampai detik ini musim penghujan tidak kunjung datang, akhirnya kekeringan pun menjadi tamu tak diundang, air tak lagi mengalir deras, keperluan

untuk kehidupan sehari-hari pun semakin terbatas.

Karena sisa air di rumah digunakan untuk kepentingan memasak, cara terbaik untuk tetap bertahan adalah dengan mengurangi penggunaan air

bersih. Saya sendiri menghabiskan waktu hampir 2 minggu menggunakan kamar mandi masjid kampus Universitas Hasanuddin. Perjalanan ke kampus bukan hanya membawa 1 buah pulpen, dompet dan juga charger, kali ini handuk, baju ganti, dan juga perlengkapan mandi ikut serta membersamai perjalanan saya menuju kampus.

Siang hari, kira-kira di jam 2 siang dan masih di hari yang sama, awan mendung menyapa, sebuah pemandangan yang tidak pernah terlihat beberapa bulan lamanya. Saya duduk di salah satu tempat yang sangat familiar dikunjungi oleh mahasiswa antropologi, baik untuk menunggu waktu kuliah, atau sekadar merasakan suasana kampus saja. Saat saya bercerita dengan rekan terkait dengan rencana penelitian skripsi yang ingin diajakannya, hujan menyempurnakan suasana. Saya langsung mengambil pemandangan berharga itu dan mengirimnya di cerita instagram pribadi saya dengan caption "yang dinantikan". Wajar saja, menjelang akhir Oktober hujan tak kunjung turun, dan kemarau panjang kemudian menghadirkan kekeringan dan krisis air di Kota Makassar, untung saja rumah saya mengalami krisis air tidak lama, di wilayah lain seperti di Nusa Tamalanrea Indah (NTI) masyarakat sudah mengantri jerigen sejak akhir bulan Juli.

Kekeringan yang terjadi pada tahun 2023 ternyata buah dari


El Nino atau sebuah fenomena yang menghadirkan kemarau yang lebih panjang dan lebih kering. Saat ini ketika saya menulis tulisan ini, kita sudah tiba pada tahun 2026, pengalaman kekeringan pada tahun 2023 merupakan jejak tulisan saya yang tertulis dalam buku catatan keseharian, serta dokumentasi kenangannya lewat arsip postingan cerita saya di instagram. Ancaman kekeringan dan krisis air tentu saja sangat menakutkan. Sederhananya air adalah sumber kehidupan, jika air sudah berada pada kadar yang mengkhawatirkan, tentu saja akan sangat berdampak pula dengan kehidupan. Fenomena El Nino memang tidak datang tiap tahun, tiap 2 tahun, atau terjadwal berdasarkan siklusnya, tapi dia bisa datang kapan saja, dan terakhir kali El Nino terjadi di Indonesia adalah pada tahun 2023.

Namun dengan begitu, ancaman bukan berarti pergi begitu saja, sayangnya, ancaman pada akhirnya bisa kita ciptakan sendiri, krisis air akibat El Nino yang menghadirkan kekeringan saat ini sudah bisa digantikan oleh masifnya intensitas industri. Di daerah hulu, khususnya di Sulawesi Selatan konsumsi air rumah tangga kini semakin krisis akibat kebutuhan industri yang menggunakan pasokan air yang melimpah. Penggunaan air tanah dalam skala besar oleh industri khususnya smelter pada akhirnya menurunkan muka air tanah dan menyebabkan sumur warga kering. Daerah Aliran Sungai (DAS) juga ikut

tercemar akibat limbah industri yang mencemari tanah dan juga sungai hingga tidak bisa lagi dikonsumsi oleh masyarakat. Berbagai dampak yang dihasilkan menghadirkan krisis air, air yang selama ini sudah menjadi sumber kehidupan masyarakat akibat masifnya industri justru terus melanjutkan eksploitasi, merusak dan mengancam hak-hak hidup masyarakat.

Tidak cukup sampai disitu, hancurnya wilayah hulu, tercemarnya wilayah DAS tidak membuat wilayah hilir terbebas dari krisis, ancaman hilir datang dari industri dengan wajah baru atas nama reklamasi. Saat ini Kota Makassar di bawah bayang-bayang reklamasi besar-besaran di wilayah kampung Untia. Belum selesai dengan konflik yang terjadi atas perampasan hak hidup masyarakat di lokasi reklamasi Makassar New Port, juga belum kembalinya penghasilan sumber daya perikanan masyarakat Kodingareng akibat pertambangan pasir laut untuk reklamasi, keduanya ternyata tidak membuat rencana reklamasi Untia dibatalkan. Kabar terakhir, eksplorasi atau pemetaan lokasi sudah dilakukan, tinggal menunggu waktu saja kehancuran atas nama reklamasi itu diluncurkan.

Wilayah reklamasi bukan sebatas timbunan dan industri, lebih dari itu hadirnya bisa merampas kebutuhan masyarakat terutama hak atas air. Dalam laporan riset WALHI SULSEL



pada tahun 2024, data menunjukkan bahwa Makassar Utara memiliki jumlah pelanggan yang cukup banyak justru menerima air dari PDAM Kota Makassar dengan jumlah yang sedikit. Kondisinya berbeda dengan beberapa kecamatan yang masuk dalam wilayah Makassar Barat yang memiliki jumlah pelanggan

sedikit dengan jumlah industri besar tapi volume air yang disalurkan sangatlah fantastis. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan untuk industri masih menjadi yang utama, bayang-bayang pertambangan sudah menghantui di wilayah hulu, pencemarannya sudah melahirkan krisis yang berkepanjangan. Jika di wilayah

hulu krisis air karena wilayahnya yang dieksploitasi, maka di wilayah hilir krisis air karena hak mereka di privatisasi. Sederhananya, kekeringan dan krisis air bukan lagi fenomena musiman melainkan sebuah krisis yang diciptakan.



# INFO

FAKTA  
EKOLOGI

Pulihkansulsel

# WALHI SULSEL

WALHI SULSEL GELAR KONFERENSI PERS: EKSPOSE HASIL MONITORING PASCA TUMPAHAN MINYAK PT. VALE INDONESIA DI KEC. TOWUTI KAB. LUWU TIMUR

Enam bulan pasca tumpahan minyak jenis Marine Fuel Oil (MFO) milik PT Vale Indonesia di Kecamatan Towuti, Luwu Timur, WALHI Sulawesi Selatan menegaskan bahwa dampak ekologis dan sosial masih dirasakan masyarakat.

"Temuan kami menunjukkan alur tumpahan minyak mencapai 18,777 kilometer—Hampir 19 kilometer—minyak mengalir dari hulu Sungai Koromusilu di Desa Lioka, melewati enam desa hingga ke Danau Towuti. Ini menunjukkan skala pencemaran jauh lebih luas dari yang selama ini disampaikan."



**BACA SELINGKAPNYA DI WEBSITE  
WALHI SULAWESI SELATAN**

SCAN **OR BARCODE**



<https://bit.ly/walhisulsel>



FAKTA  
EKOLOGI

*Edisi Februari 2026*